



LAPORAN TAHUNAN

PROGRAM TERPADU PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK MENURUNKAN KERENTANAN MASYARAKAT PERDESAAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA



Kepemimpinan Perempuan (Staf SID) dalam Proses Kajian Risiko Bencana di Desa Matawai Pawali, Kabupaten Sumba Timur

ORGANISASI PELAKSANA: WORLD NEIGHBORS
PERIODE LAPORAN: DESEMBER 2022 – DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

World Neighbors (WN) adalah lembaga internasional non-pemerintah yang didirikan di Oklahoma City, Amerika Serikat, pada tahun 1951. WN beroperasi sebagai organisasi yang bersifat non-sektarian, non-politik, dan nir-laba, dengan komitmen utama memperkuat kapasitas masyarakat marginal di wilayah perdesaan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, WN mendorong terciptanya solusi-solusi inovatif yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar, termasuk kemiskinan, kelaparan, degradasi sumber daya alam, serta kerentanan lingkungan. Strategi intervensi WN menitikberatkan pada peningkatan kapasitas lokal, penguatan kelembagaan masyarakat, dan penerapan praktik adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

Kerjasama WN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) telah berlangsung dalam dua periode, yaitu pertama pada April 2015 hingga April 2018, dan kedua pada November 2018 hingga November 2021. Pada periode kedua, melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP), program yang dimandatkan berjudul “Program Terpadu Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Menurunkan Kerentanan Masyarakat Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara.” Program ini menekankan penguatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat desa; fasilitasi praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; serta pemanfaatan analisis kerentanan melalui Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK) untuk perencanaan pembangunan daerah dan desa.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program telah dilakukan secara virtual oleh Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) bersama KLHK pada Juli 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program kerjasama ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas lokal, penerapan praktik adaptasi perubahan iklim yang efektif, serta integrasi data kerentanan untuk perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, WN dinilai berhasil menjalankan koordinasi yang baik dengan KLHK, mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam MSP, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian program dan kegiatan KLHK. Berdasarkan hasil evaluasi akhir bersama TPOA tersebut, kerjasama ini memperoleh perpanjangan izin prinsip selama tiga tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral yang ditandatangani oleh Direktur Sosial Budaya dan OINB Kementerian Luar Negeri No. 15892/TI/09/2021/51 tertanggal 21 September 2021. Berdasarkan persetujuan tersebut, WN bersama KLHK menyusun MSP, Arahan Program, dan Rencana Induk Kegiatan sebagai dasar pelaksanaan program lanjutan.

1.2. TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI) dan World Neighbors (WN) bertujuan untuk memberikan kerangka kerja sama bagi WN untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dalam pelaksanaan program nasional adaptasi perubahan iklim dalam rangka untuk :

1. Menurunkan kerentanan masyarakat perdesaan,
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan/sumber daya alam,

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

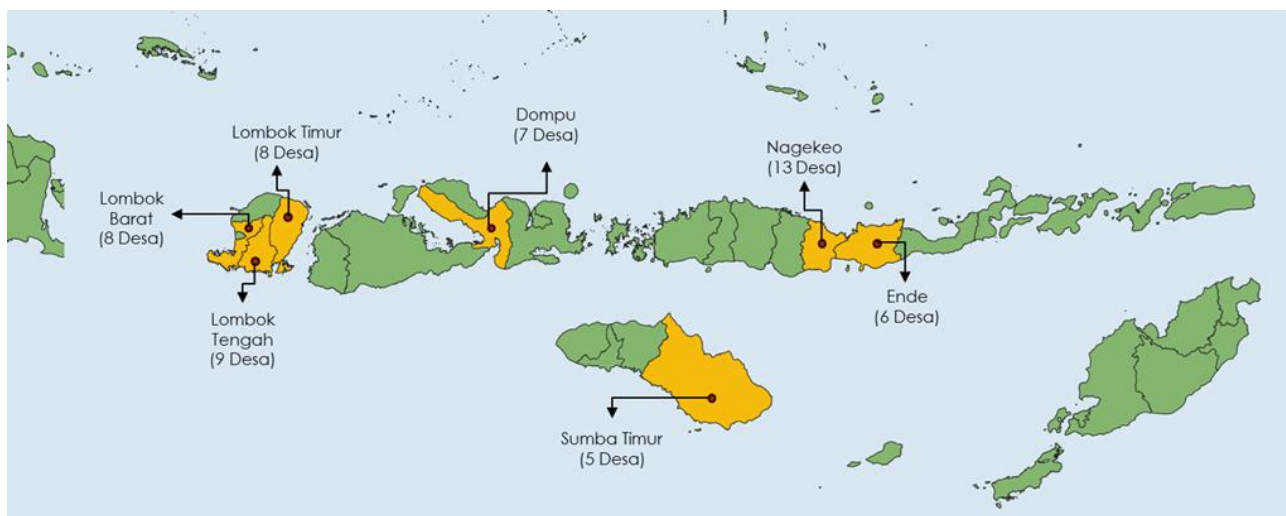
Ketiga tujuan tersebut selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis KLHK tahun 2020-2024 serta *Nationally Determined Contribution* (NDC).

1.3. RUANG LINGKUP PROGRAM

Program kerjasama ini mencakupi 2 ruang lingkup program dengan kegiatan-kegiatan utama masing-masing ruang lingkup yaitu :

1. Penguatan kapasitas di bidang adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB).
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan tentang API dan PRB bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan;
 - 2) Melakukan pendampingan dalam penyusunan rekomendasi aksi dan integrasi API dan PRB ke dalam dokumen rencana pembangunan;
 - 3) Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok masyarakat dalam memobilisasi dukungan sumber daya dari pemerintah dan sektor swasta untuk kegiatan API dan PRB;
 - 4) Menyelenggarakan pelatihan untuk penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaksana Kampung Iklim.
2. Peningkatan ketahanan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis masyarakat.
 - 1) Pendampingan kelompok masyarakat pelaksana Proklam dalam pengembangan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim melalui penyusunan kajian kerentanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi, serta monitoring dan evaluasi Proklam.

1.4. LOKASI PROGRAM DAN MITRA LOKAL



Program ini dilaksanakan di 7 kabupaten sasaran yang tersebar di 2 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). WN bekerja sama dengan mitra lokal yang berbeda di setiap kabupaten. Di NTB, lokasi program mencakup 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan (PSP)-NTB di 8 desa (Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Bayu Urip, Kuripan

Selatan, Giri Tembesi, Saribaye, dan Batu Mekar); Lombok Tengah bekerja sama dengan Berugak Dese Lombok (BDL) di 9 desa (Tanah Beak, Selong Belanak, Montong Ajan, Mekarsari, Prabu, Tumpak, Barabali, Lendang Ara, dan Taman Indah); Lombok Timur bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di 8 desa (Sugian, Dara Kunci, Seruni Mumbul, Sapit, Pringgabaya Utara, Perian, Montong Betok, dan Jurit); dan Dompu bekerja sama dengan Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL) di 7 desa (Songgajah, Lasi, Pekat, Nangamiro, Karamabura, Karombo dan Calabai). Di NTT, lokasi program mencakup 3 kabupaten, yaitu Nagekeo bekerja sama dengan Yayasan Mitra Tani Mandiri Flores (YMTMF) di 13 desa (Tedakisa, Ngegedhawe, Natatoto, Pagomogo, Dhereisa, Kota Keo 1, Raja Selatan, Raja Timur, Raja, Wolowea Timur, Natanage Timur, Nagesapadhi, dan Rowa); Ende bekerja sama dengan Yayasan Tananua Flores (YTNF) di 6 desa (Kelikiku, Wolotolo, Wolomage, Ja Mokeasa, Wologai dan Wologai Dua); dan Sumba Timur bekerja sama dengan Sumba Integrated Development (SID) di 5 desa (Ndapayami, Tandula Jangga, Prepaha, Kambuhapang, dan Matawai Pawali).

Selama pelaksanaan program, total sebanyak 56 kelompok Proklim telah didampingi, terdiri dari 26 kelompok Proklim lama (sudah mendapat intervensi pada periode 2018-2021) dan 30 kelompok Proklim baru (mulai intervensi pada periode 2022-2025). Pendampingan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, hingga monitoring pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat desa. Dengan keterlibatan aktif mitra lokal, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi risiko iklim dan bencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan intervensi melalui kolaborasi yang konsisten antara kelompok masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

II. RENCANA TIGA TAHUN DAN CAPAIAN TAHUN PERTAMA

A. Penguatan Kapasitas di Bidang Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

A.1. Menyelenggarakan pelatihan tentang API dan PRB bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan

A.1.1 Menyelenggarakan pelatihan tentang API dan PRB bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang relevan



Outcome A.1.1 menargetkan minimal 65% peserta pelatihan mampu memfasilitasi pelatihan API dan PRB bagi masyarakat desa. Hingga periode pelaporan, capaian outcome menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni 75%. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah daerah telah berjalan baik dan mampu mendiseminasikan pengetahuan API dan PRB secara efektif di tingkat desa.

Dari sisi output, capaian kinerja secara umum telah melampaui target. Jumlah staf pemerintah daerah yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 205 orang atau 143% dari target 143 orang. Frekuensi pelatihan telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Jumlah peserta pelatihan mencapai 274 orang atau 125% dari target 220 orang, sementara fasilitasi pelatihan bagi masyarakat desa telah terlaksana 30 kali, juga sesuai dengan target (100%).

Lombok Barat – Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) bagi Staf Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Secara keseluruhan, seluruh indikator menunjukkan hasil yang sangat positif dengan rata-rata capaian berada di atas 100%. Keberhasilan ini tidak hanya mengindikasikan efektivitas pelatihan, tetapi juga memperlihatkan kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa maupun pemerintah daerah dalam memperkuat agenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Data lebih rinci mengenai capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.1.1 : Minimal 65% dari peserta pelatihan memfasilitasi pelatihan API dan PRB bagi masyarakat desa	65%	75%	115%
A.1.1 # orang staf Pemda, dll fasilitasi latihan API dan PRB bagi masyarakat	143	205	143%
A.1.1.1 # frekwensi latihan	7	7	100%
A.1.1.1 # orang yang ikut latihan	220	274	125%
A.1.1.2 # frekwensi fasilitasi latihan bagi masyarakat di desa baru	30	30	100%

A.1.2 Menyelenggarakan pelatihan API dan PRB bagi staf pemerintah desa, pengurus kelompok, dan masyarakat rentan

Outcome A.1.2 menargetkan minimal 70% peserta pelatihan tingkat desa mampu menerapkan hasil pelatihan terkait Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Hingga periode pelaporan, capaian indikator ini masih berada pada level 0%, sehingga outcome belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih membutuhkan pendampingan yang intensif untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Hal ini akan menjadi prioritas perhatian pada tahun kedua.

Dari sisi output, capaian kinerja menunjukkan variasi. Indikator frekuensi pelatihan tercapai penuh sesuai target, yaitu sebanyak 30 kali (100%). Jumlah peserta yang terdiri dari perangkat desa, pengurus kelompok, serta kelompok masyarakat rentan tercatat 1.284 orang, melampaui target 1.135 orang (130%). Namun, pelaksanaan monitoring penerapan hasil pelatihan masih relatif rendah, baru mencapai 30 kali dari target 90 kali (58%). Monitoring dan pendampingan akan terus dilanjutkan.

Secara umum, pelaksanaan pelatihan dan tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan sangat baik, bahkan melebihi target. Akan tetapi, adopsi hasil pelatihan di lapangan membutuhkan waktu lebih lama dan pendampingan yang rutin. Dengan capaian outcome yang masih nihil, maka akan dilakukan upaya penguatan mekanisme pendampingan pasca pelatihan serta peningkatan intensitas monitoring. Hal ini penting agar pada tahun kedua dan ketiga, peserta dipastikan mampu mengaplikasikan keterampilan API dan PRB secara nyata di lingkungan masing-masing. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Desa Sugian, Lombok Timur – Peserta Pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.1.2 Minimal 70% peserta latihan tingkat desa mampu menerapkan API dan PRB	70%	0	0%
A.1.2 # % peserta latihan tingkat desa telah menerapkan hasil latihan API dan PRB	70%	0%	0%
A.1.2.1 # frekwensi pelatihan	30	30	100%
A.1.2.1 # orang staf Pemdes, pengurus kelompok, dan masy. rentan terlibat latihan	1.135	1.284	130%
A.1.2.2 # monitoring penerapan hasil latihan API dan PRB	90	30	58%

A.1.3 Menyelenggarakan pelatihan dan praktek teknik-teknik pertanian konservasi dan budidaya tanaman pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim bagi masyarakat



Outcome A.1.3.2 menetapkan target 75% masyarakat yang telah dilatih mampu melaksanakan praktik teknologi pertanian konservasi dengan menggunakan pupuk kompos. Pada tahun pertama, capaian outcome berada pada level 62% atau setara 83% dari target tiga tahun. Capaian ini merefleksikan kemajuan yang cukup signifikan, dan akan dilanjutkan pelatihan dan pendampingan yang intensif pada tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi output, capaian menunjukkan hasil yang bervariasi. Kegiatan A.1.3.1 terkait pelatihan dan praktik pembuatan

kompos/bokashi mencatat frekuensi pelatihan sebesar 68% (53 dari target 78 kali), dengan tingkat keterlibatan masyarakat 62% (1.185 dari target 1.900 orang). Pada kegiatan A.1.3.2 mengenai pelatihan dan praktik teknologi pertanian konservasi (TPK), jumlah peserta yang mampu mempraktikkan teknologi tercapai 770 orang atau 54% dari target 1.425 orang, sementara frekuensi pelatihan mencapai 68% dan keterlibatan masyarakat 62%. Secara agregat, capaian output telah memberikan fondasi awal yang kuat untuk memperluas adopsi praktik konservasi di lapangan ke depan. Data terperinci terkait capaian outcome dan output dapat dilihat pada tabel berikut.

Giri Tembesi, Lombok Barat – Praktek Pembuatan Lubang pada Kegiatan Pertanian Konservasi dengan Menggunakan Kompos

Kegiatan & Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.1.3.2: 75% masyarakat yang telah dilatih mampu melaksanakan praktek teknologi pertanian konservasi dengan menggunakan pupuk kompos	75%	62%	83%
A.1.3.1 Pelatihan dan praktek pembuatan kompos/bokashi			
A.1.3.1 # frekwensi latihan dan praktek	78	53	68%
A.1.3.1 # orang masyarakat yang terlibat dlm pelatihan & praktek dalam pembuatan kompos	1.900	1.185	62%
A.1.3.2 Pelatihan dan praktek teknologi pertanian konservasi (TPK)			
A.1.3.2 # peserta yang telah dilatih mampu praktek teknologi pertanian konservasi dengan memakai pupuk kompos	1.425	770	54%
A.1.3.2 # frekwensi latihan dan praktek	78	53	68%
A.1.3.2 # orang masyarakat yang terlibat dalam latihan dan praktek	1.900	1.185	62%
A.1.3.3 Pelatihan dan praktek budidaya tanaman pangan lokal (tanaman pangan yang potensial dan adaptif terhadap pola curah hujan)			
Outcome A.1.3.3 : 75% masyarakat yang telah dilatih mampu budidaya tanaman pangan lokal yang adaptif perubahan iklim	75%	69%	92%
A.1.3.3 # peserta yang telah dilatih mampu budidaya tanaman pangan lokal	1.500	800	53%
A.1.3.3 # frekwensi latihan dan praktek	75	58	77%
A.1.3.3 # orang masyarakat yang terlibat dalam latihan dan praktek tanaman pangan lokal	2.000	1.163	58%
A.1.3.3 # luasan lahan ditanami tanaman pangan lokal	90	104	116%

Sementara itu, outcome A.1.3.3 menargetkan 75% masyarakat mampu membudidayakan tanaman pangan lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pada tahun pertama, capaian outcome mencapai 69% atau 92% dari target tiga tahun, menunjukkan progres yang baik. Pada tingkat output, jumlah peserta yang mampu membudidayakan tanaman pangan lokal mencapai 800 orang atau 53% dari target 1.500 orang. Frekuensi pelatihan telah mencapai 77%, tingkat keterlibatan masyarakat sebesar 58%, dan capaian luasan lahan bahkan melampaui target, yakni 104 are dibandingkan dengan target 90 are (116%).

Secara keseluruhan, kedua outcome menunjukkan tren capaian yang positif, dengan rata-rata realisasi output berada pada kisaran 54%–77%. Keberhasilan melampaui target pada indikator luasan lahan mengindikasikan adanya penerimaan dan adopsi yang baik oleh masyarakat.

A.1.4 Menyelenggarakan pelatihan dan praktek pertanian lahan kering dengan model “agroforestry”



Outcome A.1.4 menargetkan terwujudnya kebun model agroforestry yang responsif perubahan iklim di tujuh kabupaten dengan cakupan total 200 hektar. Hingga akhir tahun pertama, capaian yang terealisasi adalah seluas 143 hektar atau setara dengan 72% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan pada fase awal implementasi, meskipun diperlukan akselerasi pada tahun-tahun berikutnya untuk memastikan pemenuhan target lahan secara keseluruhan.

Realisasi output memperlihatkan perkembangan

Desa Raja, Nagekeo – Menanam Tumbuhan Umur Panjang (TUP) di Kebun Agroforestry, sebagai Praktik Pengelolaan Kebun Berketahanan Iklim

bervariasi. Sebanyak 865 orang peserta pelatihan telah menerapkan agroforestry di masing-masing. Frekuensi pelatihan dan praktik tercapai 48 kali atau 49% dari target 97 kali, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelatihan mencapai 1.276 orang atau 55% dari target 2.325 orang. Distribusi bibit tanaman umur panjang (TUP) yang responsif perubahan iklim terealisasi sebanyak 80.885 anakan atau 74% dari target 110.000 anakan. Kegiatan monitoring pertumbuhan TUP belum terlaksana (0 dari target 3 kali), sehingga persentase TUP hidup juga belum dapat diukur pada tahun pertama. Data terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.1.4 Terwujudnya kebun model agroforestry yang responsif PI di 7 kabupaten yang mencakup 200 hektar lahan	200 Ha di 7 kabupaten	143	72%
A.1.4.1 Pelatihan dan praktek model agroforestry yang responsif perubahan iklim			
A.1.4.1 # orang ikut latihan agroforestry telah menerapkannya sendiri	N/A	865	
A.1.4.1 # frekwensi pelatihan dan praktek	97	48	49%
A.1.4.1 # orang masyarakat yang terlibat dalam latihan dan praktek agroforestry	2,325	1,276	55%
A.1.4.1 # luasan lahan yang dikelola kebun model agroforestry	205.38	143	70%
A.1.4.1 # jumlah bibit tanaman umur panjang yang responsif perubahan iklim dr sumber bibit KLHK	110.000	80.885	74%

A.1.4.2 # frekwensi monitoring pertumbuhan tanaman umur panjang (TUP)	3	0	0%
A.1.4.2 Persentase TUP hidup	N/A	0	

Secara agregat, capaian outcome A.1.4 pada tahun pertama menunjukkan kinerja yang positif dengan pencapaian di atas 70% pada indikator lahan dan distribusi bibit. Namun, indikator frekuensi pelatihan, keterlibatan peserta, serta sistem monitoring masih akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

A.1.5 Menyusun Modul Pelatihan API dan PRB serta Modul Agroforestry

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.1.5 Tersedianya modul pelatihan API dan PRB bagi staf Pemda, pemangku kepentingan, staf Pemdes, dan masyarakat desa serta modul model agroforestry	1 set modul final (100%)	1 set modul (draft 60%)	60%
A.1.5.1 # modul pelatihan API dan PRB bagi staf Pemda dan pemangku kepentingan dipublikasikan	1 set	1 set modul (draft 60%)	60%
A.1.5.2 # modul pelatihan API dan PRB bagi staf Pemdes dan masyarakat desa dipublikasikan	1 set	1 set modul (draft 60%)	60%
A.1.5.3 # modul pelatihan agroforestry berketahanan iklim dipublikasikan	1 set	1 set modul (draft 60%)	60%

Merujuk pada tabel di atas bahwa outcome A.1.5 menargetkan tersedianya satu set modul pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bagi staf Pemda, pemangku kepentingan, staf desa, serta masyarakat desa, termasuk modul agroforestry berketahanan iklim. Hingga tahun pertama, capaian outcome berada pada level 60%, dengan ketersediaan draf modul yang telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengembangan substansi modul sudah berjalan sesuai rencana, meskipun belum mencapai target finalisasi penuh untuk publikasi karena prioritaskan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dari sisi output sebagaimana tercantum pada tabel di atas, setiap indikator menunjukkan capaian yang relatif seragam, yaitu 60% dari target. Modul API dan PRB untuk staf Pemda dan pemangku kepentingan, modul untuk staf desa dan masyarakat desa, serta modul agroforestry berketahanan iklim masing-masing telah tersedia dalam bentuk draf, namun masih memerlukan tahap dan penyempurnaan sebelum dapat dipublikasikan secara final.

Secara keseluruhan, capaian outcome dan output tahun pertama memberikan indikasi positif bahwa target akhir tiga tahun dapat tercapai, dengan catatan adanya percepatan dalam proses finalisasi modul pada periode berikutnya.

A.1.6 Menyelenggarakan pelatihan dan praktek konservasi/rehabilitasi lahan kritis di sumber mata air (SMA)

Outcome A.1.6 menargetkan terwujudnya perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air (SMA) yang responsif perubahan iklim di tujuh kabupaten dengan cakupan 20 hektar lahan di 31 titik SMA pada 25 desa baru. Hingga tahun pertama, capaian outcome telah melampaui target dengan realisasi 20,54 hektar atau 103% dari target luasan, yang mencakup keseluruhan 31 SMA di 25 desa baru (100%).

Dari sisi output, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang baik. Frekuensi pelatihan dan praktik di desa baru telah mencapai target penuh (25 kali atau 100%), sementara jumlah peserta

pelatihan tercatat 831 orang dari target 1.100 (76%). Indikator jumlah sumber mata air yang dikonservasi mencapai 98% (55 dari 56 sumber), sedangkan luasan area SMA yang dikelola telah terealisasi 34,74 hektar atau 85% dari target 41 hektar. Adapun jumlah TUP dari sumber bibit BPDAS-KLHK yang ditanam telah mencapai 56.745 anakan atau 86% dari target 66.000 anakan.

Dari target 21 kali frekuensi monitoring, baru terlaksana 7 kali atau 33%, hal ini akan diselesaikan pada tahun kedua dan ketiga. Persentase TUP hidup juga baru berada pada kisaran 71%, yang masih memerlukan perhatian lebih dalam aspek pemeliharaan. Secara keseluruhan, outcome A.1.6 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam perlindungan dan pemulihan sumber mata air, namun diperlukan strategi penguatan pada aspek monitoring dan keberlanjutan pertumbuhan tanaman untuk memastikan manfaat konservasi berjalan optimal dalam jangka panjang. Data terperinci terkait capaian outcome dan output dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
A.1.6.1 Pelatihan dan praktek konservasi lahan kritis dan/atau sumber mata air (SMA)			
Outcoma A.1.6 Terwujudnya perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air yang responsif PI di 7 kabupaten yang mencakup 20 hektar lahan di 31 SMA yang mencakupi 25 desa baru yang ada SMA	20 Ha di 31 SMA di 25 desa baru	20,54 Ha di 31 SMA di 25 desa baru	103%;100%; 100%
A.1.6.1 # frekwensi latihan & praktek di desa baru	25	25	100%
A.1.6.1 # orang masyarakat yang terlibat dalam latihan & praktek konservasi SMA di desa baru	1.100	831	76%
A.1.6.1 # sumber mata air yang dikonservasi	56	55	98%
A.1.6.1 # luasan areal SMA di desa baru dan desa lama yang dikonservasi	41	34.74	85%
A.1.6.1 # jumlah TUP dari sumber bibit KLHK yang ditanam pada area konservasi SMA di desa baru dan desa lama	66	56.745	86%
A.1.6.2 Monitoring pertumbuhan tanaman umur panjang (tanaman yang potensial dan responsif terhadap PI)			
A.1.6.2 # frekwensi monitoring	21	7	33%
A.1.6.2 # persentase TUP hidup	N/A	71%	

A.2. Melakukan pendampingan dalam penyusunan rekomendasi aksi dan integrasi API dan PRB dalam dokumen rencana Pembangunan

A.2.1 Menyelenggarakan workshop/pertemuan forum pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah dan DPRD di tingkat kabupaten

Outcome A.2.1 menargetkan dukungan dana pemerintah daerah sebesar Rp 3.000.000.000 untuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB) masyarakat. Hingga tahun pertama, capaian baru terealisasi Rp 307.875.000 atau setara 10% dari target akhir tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat langkah awal yang positif, tingkat dukungan pendanaan dari Pemda masih relatif rendah.

Dari sisi output, beberapa indikator menunjukkan capaian yang beragam. Penyusunan dokumen rencana aksi telah berjalan optimal dengan tersusunnya 112 draft dokumen sesuai target (100%). Namun, pada aspek monitoring realisasi dana Pemda, capaiannya yakni 30 kali dari target 105 kali atau sekitar

29%. Sementara itu, jumlah dokumen rencana aksi yang mendapatkan dukungan dana Pemda untuk merealisasikan kegiatan API dan PRB masyarakat mencapai 43 dari target 73 dokumen atau setara 59%.

Secara umum, pelaksanaan program telah berhasil mencapai target pada aspek penyusunan rencana aksi, dan ini akan menjadi fokus perhatian dalam hal advokasi pendanaan dari berbagai pihak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.2.1 Terwujudnya kebijakan Pemda yang mendukung pendanaan sebesar Rp 3.000.000.000 terhadap rencana aksi API dan PRB masyarakat	3.000.000.000	307.875. 000	10%
A.2.1.1 Memfasilitasi penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan PRB			
A.2.1.1 # Draft dokumen rencana aksi	112	112	100%
A.2.1.2 Monitoring realisasi dana Pemda untuk mendukung aksi-aksi API PRB masyarakat			
A.2.1.2 # frekwensi monitoring realisasi dana Pemda	105	30	29%
A.2.1.2 # dokumen rencana aksi mendapat dukungan dana Pemda untuk merealisasikan rencana aksi-aksi API dan PRB masyarakat	73	43	59%

A.2.2 Memfasilitasi penggunaan SIDIK untuk menyediakan data dan informasi kerentanan serta rekomendasi untuk penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan daerah

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.2.2 Terwujudnya rencana pembangunan pemerintah daerah dan desa yang mengakomodir minimum 40% rekomendasi dari hasil kajian kerentanan dengan SIDIK	40%	0%	0%
A.2.2.1 Fasilitas penguatan Tim SIDIK dan/atau integrasi dengan Pokja Adaptasi PI			
A.2.2.1 # Tim SIDIK/ Pokja Adaptasi PI yang legal	7	3	43%
A.2.2.2 Fasilitas penilaian kerentanan dengan metode SIDIK berdasarkan data Podes dan data/ informasi dari OPD-OPD			
A.2.2.2 # update hasil analisis SIDIK sesuai dengan data Podes dan data eksternal yang baru tahun 2022	7	0	0%
A.2.2.3 Fasilitas penyusunan rekomendasi dari hasil kajian kerentanan dengan SIDIK dan advokasi kebijakan dan perencanaan daerah yang adaptif terhadap PI dan PRB			
A.2.2.3 # rumusan rekomendasi dari hasil analisis SIDIK (desa)	1.158	0	0%

Merujuk pada tabel diatas bahwa outcome A.2.2 menargetkan terwujudnya rencana pembangunan pemerintah daerah dan desa yang mengakomodir minimal 40% rekomendasi hasil kajian kerentanan dengan metode SIDIK. Hingga akhir tahun pertama, outcome ini belum menunjukkan capaian (0%), karena kegiatan masih diprioritaskan untuk aksi-aksi bersama masyarakat. Kegiatan tingkat kabupaten akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Dari sisi output, terdapat capaian yang bervariasi. Pembentukan Tim SIDIK/Pokja Adaptasi PI legal telah dilakukan di 3 kabupaten dari target 7 kabupaten, atau sekitar 43%. Namun, pada aspek fasilitas penilaian kerentanan dengan metode SIDIK berdasarkan data Podes dan informasi dari OPD belum

terlaksana. Begitu pula dengan pembaruan hasil analisis SIDIK sesuai data terbaru tahun 2022 yang belum terlaksana sehingga belum dapat menyusun rekomendasinya untuk 1.158 desa dan kelurahan.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada kemajuan pada aspek kelembagaan melalui pembentukan Tim SIDIK, outcome A.2.2 masih memerlukan upaya intensif dalam mendorong pelaksanaan penilaian kerentanan dan penyusunan rekomendasi berbasis kajian pada tahun mendatang.

A.2.3 Memfasilitasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (alumni peserta latihan) dalam mendampingi pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan dan pengintegrasian rencana API dan PRB ke dalam RPJMDes

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.2.3 Pemerintah desa sasaran berkomitmen mendukung pelaksanaan rencana aksi API dan PRB dengan mengalokasikan APBDes minimum Rp 3.000.000.000 dari 56 desa sasaran program	3.000.000.000	2.296.825.663	77%
A.2.3.1 Fasilitasi pertemuan perencanaan API dan PRB ke dalam RPJMDes			
A.2.3.1 # pendampingan yang dilakukan kepada Pemdes	112	56	50%
A.2.3.1 # % rencana aksi PI dan PRB terintegrasi ke dlm RPJMDes	50%	51%	102%
A.2.3.2 Monitoring rencana API dan PRB yang direalisasikan bersama masyarakat dengan APBDes			
A.2.3.2 # % rencana API dan PRB yang terakomodir dalam RPJMDes telah direalisasikan dengan APBDes	60%	6.20%	10%
A.2.3.2 # monitoring realisasi dana dari APBDes yang telah digunakan untuk aksi API dan PRB	168	56	33%

Merujuk pada tabel di atas, Outcome A.2.3 menargetkan komitmen pemerintah desa sasaran dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui pengalokasian dana APBDes minimal sebesar Rp 3.000.000.000 dari 56 desa sasaran. Pada tahun pertama, capaian tercatat sebesar Rp 2.296.825.663 atau 77% dari target kumulatif tiga tahun, menunjukkan progres signifikan. Pencapaian ini terutama didorong oleh proses kerjasama dan advokasi yang telah berlangsung di 26 desa lama sejak tahun-tahun sebelumnya, meskipun realisasinya baru terealisasi pada tahun 2023.

Dari sisi output, capaian pelaksanaan kegiatan bervariasi. Pendampingan kepada pemerintah desa telah dilaksanakan di seluruh 56 desa sasaran, mencapai 50% dari target kumulatif 112 desa. Integrasi rencana aksi API dan PRB ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes) bahkan sedikit melampaui target, yakni 51% dibanding target 50% (102%). Namun, monitoring pelaksanaan rencana API dan PRB melalui realisasi APBDes baru mencapai 6,2% dari target 60%, sedangkan monitoring realisasi dana APBDes hanya terlaksana di 56 desa dari target kumulatif 168 desa (33%).

Secara keseluruhan, capaian outcome dan output menunjukkan kemajuan yang menjanjikan, terutama dalam hal komitmen alokasi dana dan integrasi rencana aksi ke dalam RPJMDes. Meski demikian, rendahnya persentase monitoring menjadi perhatian utama yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya untuk memastikan efektivitas penggunaan dana APBDes dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi API dan PRB secara berkelanjutan.

A.3. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Memobilisasi Dukungan Sumberdaya dari Pemerintah dan Sektor Swasta untuk Kegiatan API dan PRB

A.3.1. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapat dukungan langsung dari OPD dan sektor swasta dalam melaksanakan rencana aksi API dan PRB

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.3.1 Kelompok masyarakat sasaran berjalan efektif, mampu menjalin kerjasama dan mendapat dukungan dana dari pemerintah dan sektor swasta untuk rencana aksi API &PRB	N/A	53 kelompok dari 112	63%
A.3.1.1 Fasilitasi pelatihan penguatan kapasitas kelompok (tugas dan peran pengurus, berjejaring, strategi advokasi)			
A.3.1.1 # frekwensi pelatihan bagi kelompok masyarakat	112	72	64%
A.3.1.1 # kelompok masyarakat yang dilatih	112	90	80%
A.3.1.1 # orang anggota kelompok yang dilatih	2.000	2.098	105%
A.3.1.2 Fasilitasi kelompok masyarakat menulis proposal dan lobby kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor swasta			
A.3.1.2 # kelompok masyarakat yang membuat proposal	84	53	63%
A.3.1.2 # proposal yang ditulis kelompok masyarakat	84	92	110%
A.3.1.2 # OPD dan sektor swasta yang diberikan proposal oleh kelompok masyarakat per kabupaten	7 dan 2	6 dan 1	86% dan 50%
A.3.1.3 Fasilitasi kelompok masyarakat untuk monitoring perkembangan dukungan OPD dan sektor swasta terhadap proposalnya			
A.3.1.3 # OPD dan sektor swasta per kabupaten yang mendukung proposal kelompok masyarakat	4 OPD dan 1 swasta	1 OPD dan 1 swasta	25% dan 100%
A.3.1.3 # dana dari OPD yang telah direalisasikan untuk mendukung proposal masyarakat	850.000.000	190.362.500	22%
A.3.1.3 # dana dari sektor swasta yang telah direalisasikan untuk mendukung proposal masyarakat	145.000.000	31.000.000	21%
A.3.1.3 # Success story kerjasama kelompok masyarakat dengan sektor swasta	4	0	0%

Merujuk pada tabel di atas, outcome A.3.1 menargetkan kelompok masyarakat sasaran mampu berjalan efektif, menjalin kerja sama, serta memperoleh dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk rencana aksi API dan PRB. Pada tahun pertama, capaian menunjukkan keterlibatan 53 kelompok dari target kumulatif 112 kelompok (63%), yang menggambarkan kemajuan cukup baik.

Dari sisi output, sebagaimana data yang disajikan pada tabel di atas, terdapat beberapa capaian positif. Pada kegiatan fasilitasi pelatihan, 72 kelompok telah mengikuti pelatihan (64%), 90 kelompok terlatih (80%), dan jumlah anggota yang terlibat mencapai 2.098 orang, melampaui target (105%). Capaian signifikan juga terlihat pada fasilitasi penulisan proposal, di mana 92 proposal telah dihasilkan dari 53 kelompok (110%). Namun, pada indikator lobi ke OPD dan sektor swasta, capaian relatif bervariasi, yakni 86% untuk OPD dan 50% untuk sektor swasta.

Sementara itu, pada fasilitasi monitoring dukungan OPD dan swasta terhadap proposal kelompok, capaian masih rendah. Baru 1 OPD (25%) dan 1 sektor swasta (100%) yang mendukung, dengan realisasi dana Rp 190,36 juta (22%) dari OPD dan Rp 31 juta (21%) dari sektor swasta.

Secara keseluruhan, Outcome A.3.1 menunjukkan capaian yang cukup baik terutama pada peningkatan kapasitas kelompok dan penyusunan proposal. Namun, masih perlu perhatian pada tahun mendatang pada aspek advokasi, lobi, serta realisasi dukungan dana dari OPD maupun sektor swasta.

A.4. Menyelenggarakan pelatihan untuk penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaksana Kampung Iklim

A.4.1. Memfasilitasi masyarakat (perempuan) dalam pembentukan kelompok keuangan mikro, pelatihan dan praktek sistem pembukuan dan administrasi kelompok, serta pengembangan kewirausahaan

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.4.1. Terwujudnya masyarakat (perempuan) yang mampu mengembangkan bisnis dengan pinjaman modal dari simpanan anggota kelompok minimum Rp 200.000.000, -	200.000.000	71.995.000	36%
A.4.1.1. Pelatihan penyadaran dan pembentukan kelompok keuangan mikro bagi masyarakat perempuan			
A.4.1.1 # frekwensi pelatihan penyadaran	70	47	67%
A.4.1.1 # kelompok keuangan mikro yang terbentuk	70	72	103%
A.4.1.1 # orang masyarakat yang terlibat dalam latihan penyadaran & pembentukan usaha simpan pinjam	1.400	1.192	85%
A.4.1.1 # orang masyarakat yang menjadi anggota aktif dan kelompok UBSP baru yang masih aktif saat ini	1.050	915	87%
A.4.1.2. Pelatihan dan praktek pembukuan dan administrasi kel. keuangan mikro			
A.4.1.2 # frekwensi pelatihan pembukuan	15	35	233%
A.4.1.2 # orang anggota kelompok yang terlibat latihan pembukuan dan administrasi	350	445	127%
A.4.1.3 Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok keuangan mikro (perempuan)			
A.4.1.3 # frekwensi pelatihan kewirausahaan	14	28	200%
A.4.1.3 # orang anggota kelompok yang terlibat latihan kewirausahaan	375	439	117%
A.4.1.3 # orang peserta latihan kewirausahaan yang mengembangkan bisnis	225	121	54%
A.4.1.4 Monitoring perkembangan keuangan mikro dan wirausaha			
A.4.1.4 # frekwensi monitoring	10	3	30%
A.4.1.4 # modal simpanan anggota kelompok baru	200.000.000	71.995.000	36%
A.4.1.4 # Success story pengembangan usaha mikro sebagai upaya adaptasi PI	4	0	0%
Outcome A.4.1.5 Masyarakat sasaran mampu mencukupi kebutuhan pangan minimum 11 bulan dari hasil usahataniya serta pendapatan keluarganya meningkat min 30% dari baseline	11 bulan; 30% dari baseline	Baseline data bulan kecukupan pangan	0%
A.4.1.5 Survey jumlah bulan kecukupan pangan dari hasil kebun lahan pangan dan pendapatan rumah tangga			
A.4.1.5 # frekwensi survey	2	1	50%
A.4.1.5 # bulan kecukupan pangan dari hasil kebun lahan pangan bagi peserta program	11	Baseline bulan kecukupan pangan per kab.	
A.4.1.5 # % peningkatan pendapatan rumah tangga peserta program per tahun	30%	Baseline pendapatan per kab.	-



Merujuk pada tabel di atas, outcome A.4.1 menargetkan masyarakat, khususnya perempuan, mampu mengembangkan bisnis berbasis simpan pinjam kelompok dengan total modal (simpanan anggota) minimum Rp 200 juta. Pada tahun pertama, capaian baru mencapai Rp 71,99 juta atau 36% dari target tiga tahun. Hal ini menunjukkan progres awal yang cukup baik.

Dari sisi output, pelatihan penyadaran Lombok Tengah – Pertemuan Membangun Kesadaran untuk Pembentukan Kelompok Keuangan Mikro (Simpan Pinjam)."

dan pembentukan kelompok keuangan mikro sudah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 72 kelompok terbentuk (103%) dan 1.192 anggota telah terlibat (85%). Sementara anggota kelompok yang masih aktif mencapai 915 dari target 1.050 (87%). Keberhasilan ini diperkuat oleh capaian pada pelatihan pembukaan administrasi keuangan, yang melampaui target dengan frekuensi pelatihan 233% dan jumlah peserta 127%.

Pada pelatihan kewirausahaan, terdapat peningkatan kapasitas signifikan dengan 28 kali pelatihan (200%) dan 439 anggota terlibat (117%). Namun, peserta yang benar-benar mengembangkan bisnis baru tercatat 121 orang atau 54%, yang masih perlu penguatan dalam pendampingan pasca-pelatihan serta pendampingan dan monitoring kelompok simpan pinjam dan kewirausahaan.

Sementara itu, Outcome A.4.1.5 yang berfokus pada kecukupan pangan minimum 11 bulan dan peningkatan pendapatan 30% dari baseline, belum menunjukkan capaian karena data baseline baru dikumpulkan pada tahun pertama dan capaian akan diperoleh pada tahun ketiga.

A.4.2. Memfasilitasi pengembangan Program Kampung Iklim melalui penguatan kelembagaan masyarakat, aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome A.4.2 Kelompok Proklam berjalan efektif dan mampu menjalankan minimum 75% rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB	75%	35%	47%
A.4.2.1 Fasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelompok Proklam			
A.4.2.1 # kelompok Proklam yang terbentuk	30	30	100%
A.4.2.1 # kelompok Proklam lama yang diperkuat kapasitasnya – membina Proklam baru	4	4	100%
A.4.2.1 # kelompok Proklam lama yang diperkuat kapasitasnya – membangun jejaring	22	15	68%
A.4.2.2 Mentoring dan monitoring pelaksanaan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB			
A.4.2.2 # % rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB terlaksana	75%	35%	47%

Merujuk pada tabel diatas, outcome A.4.2 adalah kelompok Proklam dapat berjalan secara efektif dan mampu melaksanakan minimal 75% dari rencana aksi adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim (PI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Pada tahun pertama pelaksanaan, capaian yang diperoleh mencapai 47% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan kemajuan awal yang menjanjikan.

Untuk output terkait fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Proklam, seluruh target utama berhasil dicapai. Sebanyak 30 kelompok Proklam berhasil terbentuk, sesuai dengan target, dan 4 kelompok lama berhasil diperkuat kapasitasnya untuk membina kelompok baru, juga mencapai 100% capaian. Sementara itu, penguatan kapasitas kelompok lama untuk membangun jejaring mencapai 15 dari 22 kelompok yang ditargetkan, atau sekitar 68%, menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek kolaborasi dan jejaring.

Terkait mentoring dan monitoring pelaksanaan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB, menunjukkan capaian sebesar 35% dari target 75%, sehingga persentase pelaksanaan rencana aksi baru mencapai 47%. Secara keseluruhan, capaian tahun pertama memberikan indikasi positif terhadap penguatan kelompok Proklam, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan khususnya dalam monitoring, jejaring, dan realisasi rencana aksi adaptasi dan mitigasi.

B. Program Peningkatan Ketahanan Iklim dan Pengurangan Emisi GRK Berbasis Masyarakat

B.1 Pendampingan Kelompok Masyarakat Pelaksana Proklam dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kampung Iklim

B.1.1 Memfasilitasi kajian kerentanan, dan risiko iklim/bencana secara partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
Outcome B.1 Masyarakat dari 30 desa yang baru mampu menyusun rencana aksi PI dan PRB berdasarkan hasil kajian kerentanan dan	30 desa yang baru	30 desa telah mempunyai rencana aksi	100%
B.1.1.1 Penyusunan panduan kerentanan dan risiko iklim/bencana tingkat desa secara partisipatif			
B.1.1.1 # panduan kajian kerentanan PI di desa secara partisipatif	1	1 (draft 75%)	75%
B.1.1.2 Fasilitasi pelaksanaan kajian kerentanan, dan risiko iklim/ bencana di tingkat desa secara partisipatif			
B.1.1.2 # desa yang difasilitasi dalam menyusun kajian kerentanan dan bencana secara partisipatif	30	30	100%
B.1.1.3 Fasilitasi penyusunan dan/atau review rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB tingkat desa dan penentuan lokasi kampung iklim			
B.1.1.3 # desa yang difasilitasi penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB	30	30	100%
B.1.1.3 # desa yang difasilitasi review rencana aksi adaptasi dan mitigasi PI dan PRB	26	26	100%
B.1.1.4 Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok relawan tingkat desa yang mengawal rencana adaptasi dan mitigasi PI dan PRB			
B.1.1.4 # kelompok relawan adaptasi dan mitigasi PI dan PRB yang difasilitasi pembentukannya	30	30	100%
B.1.1.4 # kelompok relawan yang difasilitasi penguatan kapasitasnya	26	26	100%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, outcome B.1 menargetkan 30 desa baru mampu menyusun rencana aksi Pengelolaan Iklim (PI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berdasarkan hasil kajian kerentanan. Pada tahun pertama, target ini telah tercapai sepenuhnya dengan 30 desa berhasil menyusun rencana aksi, sehingga capaian outcome mencapai 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berhasil menjawab kebutuhan desa dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi berbasis kajian kerentanan.

Pada tingkat output sesuai dengan data pada tabel di atas, capaian kegiatan juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Penyusunan panduan kajian kerentanan PI di desa secara partisipatif mencapai 75% dengan tersusunnya draft panduan. Fasilitasi pelaksanaan kajian kerentanan dan risiko iklim/bencana di tingkat desa telah memenuhi target 30 desa (100%). Demikian pula fasilitasi penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi di 30 desa serta review di 26 desa terlaksana sepenuhnya (100%). Selain itu, pembentukan kelompok relawan di 30 desa serta penguatan kapasitas di 26 desa juga telah tercapai 100%, sesuai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian pada tahun pertama dapat dikategorikan sangat baik. Hampir seluruh indikator output telah mencapai target maksimal, kecuali penyusunan panduan yang masih dalam tahap penyelesaian. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan kegiatan pada tahun berikutnya, terutama dalam finalisasi panduan agar dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan kajian kerentanan dan perencanaan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat desa.

B.1.2 Memfasilitasi penilaian perkembangan kerentanan dan ketangguhan masyarakat secara reguler dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana

Kegiatan dan Indikator	Target Output 3 Th	Capaian Th I	Persentase Capaian
B.1.2.1 Fasilitasi penilaian kerentanan dan ketangguhan masyarakat terhadap PI dan PRB pada tingkat desa secara partisipatif			
B.1.2.1 # desa mencapai tingkat ketangguhan madya	30	1	3%
B.1.2.1 # panduan dan alat penilaian kerentanan dan ketangguhan masyarakat secara partisipatif	1	1 (draft 75%)	75%
B.1.2.2 Fasilitasi penilaian Proklam sesuai dengan indikator adaptasi, mitigasi dan kelembagaan berkelanjutan Proklam dari KLHK-RI (online-SRN dan offline)			
B.1.2.2 # frekwensi penilaian Proklam	2	0	0%
B.1.2.2 # Proklam mencapai level Lestari	4	0	0%
B.1.2.2 # Proklam mencapai level utama	22	0	0%
B.1.2.2 # Proklam mencapai level madya	30	0	0%
B.1.2.2 # success story pengalaman dalam mengembangkan Proklam Lestari dan Madya	7	0	0%

Merujuk pada tabel di atas, target utama kegiatan kode B.1.2 adalah peningkatan penilaian kerentanan dan ketangguhan masyarakat terhadap Perubahan Iklim (PI) serta Pengurangan Risiko Bencana (PRB), termasuk fasilitasi pelaksanaan penilaian Program Kampung Iklim (Proklam). Pada tahun pertama pelaksanaan, capaian masih relatif rendah. Dari target 30 desa yang ditetapkan untuk mencapai tingkat ketangguhan madya, baru satu desa yang berhasil tercapai, setara dengan 3% dari target. Meskipun demikian, panduan dan alat penilaian kerentanan serta ketangguhan masyarakat telah disusun dalam bentuk draft, dengan progres mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi metodologis untuk penilaian ketangguhan masyarakat telah mulai terbentuk meskipun implementasi lapangan masih terbatas. Kegiatan pendampingan ketangguhan desa akan dilanjutkan pada tahun mendatang.

Terkait fasilitasi penilaian Proklam sebagaimana data yang disajikan pada tabel di atas, capaian tahun pertama belum menunjukkan hasil karena proses penilaian Proklam memang belum dilaksanakan. Sesuai target, frekuensi penilaian direncanakan sebanyak dua kali, dengan capaian pada tahun ketiga

ditargetkan sebagai berikut: empat desa mencapai level Lestari, 22 desa pada level Utama, 30 desa pada level Madya, serta tujuh kisah sukses (success story) yang akan didokumentasikan. Adapun empat Proklamasi yang ditargetkan mencapai level Lestari mencakup: Proklamasi Lestari Dusun Dasan Agung Kebun Indah, Desa Tanak Beak, Lombok Tengah; Proklamasi Lestari Dusun Kokok Pedek, Desa Sugian, Lombok Timur; Proklamasi Lestari Dusun Barantapan Asri, Desa Seruni Mumbul, Lombok Timur; dan Proklamasi Lestari Dusun Sapit, Desa Sapit, Lombok Timur.

Secara keseluruhan, capaian tahun pertama memberikan indikasi bahwa persiapan metodologis dan panduan telah mulai terbentuk, namun implementasi penilaian ketangguhan dan Proklamasi membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya.

III. DAN REALISASI ANGGARAN PERIODE DESEMBER 2022 – DESEMBER 2023

Item Code	Item Kegiatan Utama	Budget 3 Tahun 2023-2025 Rp	Pengeluaran Thn I Des'22 - Des'23 Rp	Saldo per Desember 2023 Rp
I. Program				
A.1.1	Pelatihan API dan PRB bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan	223,922,342	223,922,342	108,781,658
A.1.2	Pelatihan API dan PRB bagi staf pemerintah desa, pengurus kelompok, dan masyarakat	283,724,942	283,724,942	102,589,058
A.1.3	Pelatihan dan praktek teknik-teknik pertanian konser- vasi dan budidaya tanaman pangan yang adaptif PI	537,999,842	537,999,842	1,285,973,158
A.1.4	Pelatihan dan praktek pertanian lahan kering dengan model “agroforestry” yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi PI	555,944,942	555,944,942	390,919,058
A.1.5	Menyusun modul pelatihan API dan PRB, serta modul agroforestry	-	-	9,000,000
A.1.6	Pelatihan dan praktek konservasi lahan kritis di sumber mata air (SMA)	449,049,598	449,049,598	363,201,402
A.2.1	Workshop/pertemuan forum pemangku kepentingan, Pemda dan DPRD kabupaten	200,187,692	200,187,692	207,251,308
A.2.2	Memfasilitasi penggunaan SIDIK untuk menyediakan data & informasi kerentanan serta rekomendasi penyusunan kebijakan dan RPJMD	303,556,603	303,556,603	251,342,397
A.2.3	Memfasilitasi Pemda dan pemangku kepentingan dalam mendampingi Pemdes dan kelompok masyarakat menyusun dan mengintegrasikan rencana API dan PRB ke dalam RPJMDes	24,343,000	24,343,000	399,929,000
A.3.1	Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendapat dukungan langsung dari OPD dan sektor swasta dalam melaksanakan rencana aksi API dan PRB	189,751,042	189,751,042	434,661,958
A.4.1	Memfasilitasi masyarakat (perempuan) dalam pembentukan kelompok keuangan mikro, serta pengembangan kewirausahaan	317,139,542	317,139,542	514,521,458
A.4.2	Memfasilitasi pengembangan Program Kampung Iklim melalui penguatan kelembagaan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan PRB	300,125,942	300,125,942	420,694,058
B.1.1	Memfasilitasi kajian kerentanan, dan risiko iklim/ bencana secara partisipatif bersama Pemdes & masy.	556,528,568	556,528,568	556,392,432
B.1.2	Memfasilitasi penilaian perkembangan kerentanan dan ketangguhan masyarakat secara reguler di tingkat desa dan Proklam	200,658,942	200,658,942	342,969,058

C.1-3	Koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi oleh WN, KLHK dan Tim Perizinan	595,646,081	595,646,081	389,353,919
Total Dana Program		10,516,159,000	4,738,579,079	5,777,579,921
II. Operasional dan Managemen – World Neighbors				
A	Salary staf pelaksana	4,506,925,000	1,119,184,474	
B	Benefit (BPJS, asuransi, dll)		123,896,020	
C	Professional fees		66,207,000	
D	Office supplies		51,879,310	
F	Other direct cost		144,401,091	
Total Dana Operasional dan Managemen		4,506,925,000	1,505,567,894	3,001,357,106
GRAND TOTAL ANGGARAN – REALISASI DAN SALDO		15,023,084,000	6,187,262,073	8,835,821,927

Total anggaran tahun 2023–2025 sebesar Rp 15.023.084.000, dengan realisasi pada tahun pertama mencapai Rp 6.187.262.073 atau sekitar 41,2 %. Dengan demikian, saldo dana yang masih tersedia per akhir Desember 2023 tercatat sebesar Rp 8.835.821.927 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tahun kedua dan ketiga. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa kegiatan program telah berjalan cukup intensif di tahun pertama.

Pada komponen program, dari total anggaran Rp 10.516.159.000, realisasi tahun pertama mencapai Rp 4.738.579.079 atau 45 %. Beberapa kegiatan inti sudah terlaksana dengan baik, misalnya pelatihan API dan PRB bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan, dan pelatihan serupa bagi staf desa dan masyarakat, kegiatan pelatihan teknik pertanian adaptif, pelatihan agroforestry, dan konservasi lahan kritis di sumber mata air. Namun demikian, penyusunan modul pelatihan yang dianggarkan sebesar Rp 9.000.000 belum digunakan sama sekali, walaupun pembuatan modul pelatihan sudah dikerjakan oleh staf WN. Rincian pengeluaran setiap item kegiatan utama tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

Pada komponen operasional dan manajemen, dari total alokasi Rp 4.506.925.000, realisasi tahun pertama mencapai Rp 1.505.567.894 atau 33,4 %. Komponen terbesar terserap pada gaji staf pelaksana diikuti benefit staf, professional fees, kebutuhan peralatan kantor serta biaya langsung lainnya. Saldo yang masih tersisa untuk operasional manajemen adalah Rp 3.001.357.106, yang dinilai cukup untuk menopang pelaksanaan program hingga dua tahun ke depan. Rincian pengeluaran setiap item operasional dapat dilihat pada tabel di atas.

Dari total realisasi anggaran pada tahun pertama sebesar Rp 6,187,262,073, sebanyak 76% (Rp 4.738.579.079) dibelanjakan untuk pelaksanaan program dan hanya 24% (Rp 1.505.567.894) yang dibelanjakan untuk biaya operasional dan manajemen. Hal ini sesuai dengan MSP yang mensyaratkan bahwa biaya operasional tidak boleh lebih dari 30%.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran pada tahun pertama menunjukkan progres yang positif dan terkendali. Beberapa kegiatan berhasil mencapai realisasi tinggi, terutama pada pelatihan, agroforestry, konservasi lahan, serta koordinasi dan monitoring. Namun, terdapat pula kegiatan yang realisasinya masih rendah atau bahkan belum terlaksana, seperti penyusunan modul pelatihan dan integrasi API-PRB ke dalam RPJMDes. Hal ini akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun kedua dan ketiga.

IV. PENUTUP

4.1. KENDALA DAN TANTANGAN

- Fenomena El Niño 2023 memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara. Kondisi iklim ekstrem ini telah memicu krisis dan kelangkaan air bersih, penurunan ketersediaan pangan, serta meningkatkan angka kematian tanaman umur panjang yang baru ditanam pada musim hujan sebelumnya. Bahkan, di beberapa lokasi di Sumba Timur terjadi kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan kerugian ekologis maupun sosial ekonomi. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Situasi ini menunjukkan lemahnya daya adaptasi ekosistem lokal terhadap perubahan iklim ekstrem, sekaligus menegaskan urgensi intervensi lintas sektor dalam bentuk penguatan sistem mitigasi dan adaptasi berbasis komunitas. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi strategis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim.
- Proses pemulihan pasca COVID-19 serta dinamika persiapan penyelenggaraan pemilu berdampak signifikan terhadap berkurangnya alokasi anggaran pembangunan yang dapat dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini mengakibatkan dukungan terhadap usulan rencana aksi Perubahan Iklim (PI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) masyarakat menjadi berkurang, sangat minim, bahkan di beberapa daerah tidak tersedia sama sekali, sehingga percepatan capaian Program Kampung Iklim (ProKlim) menjadi sulit direalisasikan. Situasi tersebut tidak hanya memperlambat pencapaian target nasional terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan lapangan dengan kapasitas dukungan pemerintah daerah. Dengan demikian sangat diperlukan adanya terobosan dalam mekanisme pendanaan alternatif maupun skema kolaborasi multipihak termasuk dengan sektor swasta.
- Terjadi serangan hama belalang di wilayah Sumba Timur yang menyerang berbagai jenis tanaman pangan, sehingga mengakibatkan kegagalan pertumbuhan dan hilangnya hasil panen pada akhir musim hujan. Kondisi ini diperburuk dengan datangnya musim kemarau panjang yang menyebabkan masyarakat semakin mengalami kekurangan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut menimbulkan kerentanan ganda, yaitu ancaman terhadap ketahanan pangan sekaligus melemahnya kapasitas ekonomi rumah tangga petani yang bergantung pada hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengendalian hama terpadu dan peningkatan cadangan pangan lokal agar masyarakat lebih tangguh menghadapi risiko serupa di masa mendatang.

4.2. PEMBELAJARAN

- Keberadaan Balai Pengendalian Perubahan Iklim (BPPI) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KLHK yang berkantor di Lombok dan menjalin kerja sama erat dengan DLHK Provinsi

memberikan dampak positif bagi penguatan dan perkembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pendampingan intensif bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten dan mitra WN, yang secara rutin turun ke lapangan untuk memberikan motivasi, bimbingan teknis, serta dorongan moral kepada pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, DLHK Provinsi juga memberikan dukungan langsung kepada kampung-kampung ProKlim yang telah teregistrasi agar dapat meningkatkan kapasitasnya menuju kategori ProKlim Lestari. Upaya ini menunjukkan bahwa sinergi antar-lembaga mampu mempercepat pencapaian target program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mendukung inisiatif lokal. Lebih jauh, pembelajaran penting yang diperoleh adalah bahwa keberhasilan pengembangan ProKlim tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas dan intensitas pendampingan yang konsisten, kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan, dan partisipasi aktif masyarakat. Model kerja sama ini dapat direplikasi di daerah lain sebagai praktik baik dalam penguatan kelembagaan ProKlim.

- Pelatihan Perubahan Iklim (PI) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang ditujukan bagi pemerintah desa, berbagai lembaga desa, serta masyarakat dari beragam unsur telah memberikan dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran baru di tingkat lokal. Kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian risiko bencana, analisis kerentanan iklim, serta penyusunan rencana aksi PI dan PRB yang lebih terarah. Proses tersebut mendorong pemerintah desa untuk mulai mensinergikan rencana aksi PI dan PRB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), sehingga intervensi yang dilakukan memiliki dasar legal dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa. Pembelajaran penting yang diperoleh adalah bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemangku kepentingan lokal melalui pelatihan dan pendampingan mampu mempercepat integrasi isu lingkungan dan kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Lebih jauh, mekanisme ini juga membuka ruang kolaborasi multipihak dan memperkuat kepemilikan program di tingkat desa, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim) secara lebih sistematis.

4.3. RENCANA TINDAKLANJUT (TAHUN KEDUA)

A. Penguatan Kapasitas di Bidang Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

- Rencana tindak lanjut yang diprioritaskan dari pelatihan tentang API dan PRB bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan adalah menjaga keberlanjutan pemanfaatan kapasitas peserta pelatihan melalui fasilitasi sistematis di tingkat desa. Peserta dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya perlu didorong untuk menularkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, sehingga manfaat pelatihan tidak berhenti pada individu, tetapi menyebar lebih luas.
- Rencana tindak lanjut dari pelatihan API dan PRB bagi staf pemerintah desa, pengurus kelompok, dan masyarakat rentan, difokuskan pada penguatan pendampingan pasca pelatihan agar pengetahuan dan keterampilan peserta dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat desa. Pendampingan sistematis dan berkelanjutan akan membantu perangkat desa, pengurus kelompok, serta masyarakat rentan dalam mengintegrasikan praktik Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam aktivitas sehari-hari maupun perencanaan pembangunan desa. Selain itu, intensitas monitoring dan evaluasi

perlu ditingkatkan untuk menilai progres, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan umpan balik yang relevan.

- Rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan dan praktek teknik-teknik pertanian konservasi dan budidaya tanaman pangan difokuskan pada peningkatan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat peserta pelatihan agar praktik teknologi pertanian konservasi dan pemanfaatan pupuk kompos dapat diadopsi secara optimal. Pendampingan ini mencakup aspek teknis dan penerapan, sehingga praktik tersebut benar-benar menjadi bagian dari sistem pertanian desa. Selain itu, strategi pelatihan akan diperkuat melalui peningkatan jumlah peserta, metode pembelajaran yang lebih efektif, serta monitoring periodik untuk mengevaluasi efektivitas intervensi.
- Rencana tindak lanjut kegiatan pelatihan dan praktek pertanian lahan kering dengan model “agroforestry” difokuskan pada penguatan kapasitas pelatihan dan perluasan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan jumlah peserta dalam pengembangan kebun model agroforestry. Upaya ini penting karena meskipun realisasi luasan lahan dan distribusi bibit telah menunjukkan hasil positif, capaian frekuensi pelatihan dan tingkat keterlibatan peserta masih di bawah target. Selain itu, monitoring pertumbuhan TUP perlu dioptimalkan dengan jadwal yang konsisten untuk menilai keberhasilan bibit, efektivitas teknik konservasi, serta memberikan umpan balik lapangan.
- Rencana tindak lanjut penyusunan modul pelatihan API dan PRB serta modul agroforestry, difokuskan pada percepatan finalisasi modul pelatihan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), termasuk modul agroforestry berketahanan iklim yang masih dalam bentuk draft. Langkah ini meliputi penyempurnaan lay out dan desain sehingga modul dapat segera dipublikasikan dan dimanfaatkan secara luas.
- Rencana tindak lanjut untuk pelatihan dan praktek konservasi/rehabilitasi lahan kritis di sumber mata air (SMA), difokuskan pada penguatan monitoring dan pemeliharaan pasca-pananaman guna memastikan keberlanjutan konservasi sumber mata air. Monitoring perlu dilakukan lebih sering dan menyeluruh pada seluruh titik konservasi agar progres lapangan terdokumentasi dengan baik serta menjadi dasar evaluasi. Selain itu, pemeliharaan tanaman harus dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok, penyediaan dukungan teknis, serta koordinasi erat dengan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.
- Rencana tindak lanjut pertemuan forum pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah pada tahun kedua akan difokuskan pada penguatan strategi advokasi dan pendampingan teknis untuk meningkatkan alokasi anggaran adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Langkah ini mencakup penguatan dialog dan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan dokumen rencana aksi ke siklus anggaran, serta pembangunan sistem monitoring yang lebih terstruktur untuk memantau realisasi pendanaan secara berkala dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah.
- Rencana tindak lanjut penggunaan SIDIK pada tahun kedua akan difokuskan pada percepatan pelaksanaan penilaian kerentanan di seluruh kabupaten sasaran melalui fasilitasi pengumpulan dan validasi data berbasis Podes serta informasi sektoral dari OPD, sekaligus pembaruan analisis sesuai data terbaru 2022. Penguatan kelembagaan Tim SIDIK di tiga kabupaten juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor, agar pembentukan tim di kabupaten lain dapat segera terealisasi, sehingga hasil

kajian kerentanan dan rekomendasi yang komprehensif dapat diintegrasikan minimal 40% ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan desa secara lebih terarah, sistematis, dan efektif.

- Rencana tindak lanjut tahun kedua untuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mendampingi pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam penyusunan serta integrasi rencana API dan PRB ke dalam RPJMDes akan difokuskan pada penguatan mekanisme monitoring implementasi rencana aksi di tingkat desa. Pendampingan akan ditingkatkan kualitasnya agar komitmen alokasi APBDes benar-benar terealisasi dalam kegiatan nyata, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, advokasi kepada pemerintah desa akan diintensifkan untuk mendorong peningkatan proporsi realisasi kegiatan adaptasi dan PRB yang telah terintegrasi ke dalam RPJMDes, sehingga capaian finansial yang positif pada tahun pertama dapat diperkuat melalui implementasi yang lebih terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
- Rencana tindak lanjut tahun berikutnya untuk fasilitasi kelompok masyarakat dalam memperoleh dukungan dari OPD dan sektor swasta akan difokuskan pada penguatan kapasitas advokasi. Hal ini mencakup fasilitasi lobi dan pendampingan teknis agar proposal yang telah disusun dapat terealisasi menjadi dukungan dana maupun kemitraan konkret. Dokumentasi dan publikasi *success story* akan dioptimalkan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menghadirkan model kemitraan yang dapat direplikasi di desa lain.
- Pada tahun berikutnya, tindak lanjut fasilitasi masyarakat (perempuan) dalam pembentukan kelompok keuangan mikro, pelatihan sistem pembukuan dan administrasi, serta pengembangan kewirausahaan akan difokuskan pada pendampingan pasca-pelatihan. Upaya ini meliputi *business coaching*, fasilitasi akses pasar, serta koneksi dengan lembaga keuangan dan sektor swasta, agar usaha anggota dapat berkembang secara berkelanjutan. Monitoring simpan pinjam kelompok juga akan terus dilakukan untuk mendorong anggota kelompok simpan pinjam untuk konsisten menabung sehingga modal simpanan kumulatif dapat mencapai Rp 200 juta. Sinergi antara kegiatan keuangan mikro, kewirausahaan, dan ketahanan pangan akan diperkuat sehingga capaian tahun kedua tidak hanya memenuhi target finansial, tetapi juga mulai meningkatkan kecukupan pangan dan pendapatan rumah tangga.
- Pada tahun kedua, tindak lanjut fasilitasi Program Kampung Iklim akan difokuskan pada penguatan kapasitas kelompok Proklim lama melalui pelatihan lanjutan, pendampingan teknis, dan kolaborasi antar-kelompok untuk memperkuat jejaring serta inovasi lokal. Implementasi rencana aksi adaptasi dan mitigasi akan dipacu melalui mekanisme mentoring terstruktur, disertai monitoring berkala dan umpan balik berbasis indikator, sehingga pelaksanaan rencana aksi meningkat signifikan dan keberlanjutan kelompok Proklim sebagai penggerak adaptasi perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal dapat terjamin.

B. Program Peningkatan Ketahanan Iklim dan Pengurangan Emisi GRK Berbasis Masyarakat

- Memasuki tahun kedua, fasilitasi kajian kerentanan dan risiko iklim akan difokuskan pada finalisasi panduan kajian kerentanan Pengelolaan Iklim (PI) di tingkat desa melalui uji coba

lapangan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan penyelarasan kebijakan, sehingga menjadi acuan standar dalam penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi. Desa yang telah menyusun rencana aksi akan difasilitasi untuk memasuki tahap implementasi melalui pendampingan teknis, monitoring berkala, serta koordinasi sinergis dengan kelompok relawan. Selain itu, penguatan kapasitas akan diperluas dari 26 desa menjadi seluruh desa sasaran melalui program *capacity building* lanjutan yang menitikberatkan pada keterampilan teknis, manajemen kelembagaan, dan pemanfaatan data kajian kerentanan.

- Memasuki tahun kedua, tindak lanjut fasilitasi penilaian perkembangan kerentanan dan ketangguhan masyarakat akan difokuskan pada percepatan peningkatan ketangguhan desa serta optimalisasi penilaian Program Kampung Iklim (Proklim). Prioritas utama mencakup finalisasi panduan dan instrumen penilaian kerentanan serta ketangguhan masyarakat sebagai acuan standar dalam memperkuat kapasitas desa menghadapi perubahan iklim dan bencana. Intervensi teknis akan diarahkan pada peningkatan jumlah desa yang mencapai level ketangguhan madya melalui pendampingan intensif, pelatihan berbasis praktik, dan penguatan peran relawan desa. Secara paralel, fasilitasi penilaian Proklim akan dipercepat melalui koordinasi yang erat dengan BPPI-KLHK, pemerintah daerah, dan mitra lokal, sehingga pada tahun kedua dapat terealisasi capaian peningkatan level Proklim desa serta tercatat *success story* yang dapat direplikasi.

Dilaporkan oleh :

Program Manager WN Indonesia



Ir. Putu Putra Suardika, M.Agb

Disetujui oleh :

Plt. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim



Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc.

NIP. 19730807 199803 2 001